

Memetakan Tingkat Toleransi di Indonesia

Muhammad Fathur Rizky - 13523105¹

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia

rizkyfathur326@gmail.com, 13523105@std.stei.itb.ac.id

Abstrak—Penelitian ini menganalisis distribusi skor akhir yang merepresentasikan tingkat toleransi di berbagai provinsi berdasarkan delapan indikator yang meliputi regulasi pemerintah kota, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi sosio-keagamaan. Analisis mencakup evaluasi statistik deskriptif, uji normalitas, serta visualisasi data melalui plotting wilayah. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa skor akhir tidak berdistribusi normal, sebagaimana dibuktikan oleh hasil tes Shapiro-Wilk ($p < 0.05$) dan visualisasi Q-Q plot. Visualisasi melalui plotting wilayah mengungkapkan distribusi skor di berbagai provinsi dengan variasi yang mencerminkan karakteristik spesifik wilayah. Temuan ini memberikan wawasan penting mengenai distribusi dan pola skor yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam meningkatkan kinerja provinsi.

Kata kunci—Indikator Toleransi, Analisis Data, Visualisasi Wilayah.

I. PENDAHULUAN

Dalam konteks keberagaman yang menjadi salah satu ciri utama Indonesia, analisis mengenai sikap toleransi antarumat beragama menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Toleransi beragama tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, tetapi juga berperan sebagai elemen vital dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di masyarakat yang beragam. Dengan populasi yang melebihi 230 juta jiwa, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan harmoni dan saling menghormati antar kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi toleransi di setiap provinsi di Indonesia melalui pendekatan kuantitatif berbasis data.

Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat tren penurunan tingkat toleransi di beberapa daerah, yang berpotensi memicu konflik sosial [1]. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, dan lokasi tempat tinggal secara signifikan memengaruhi sikap toleransi di masyarakat [2]. Selain itu, kajian sebelumnya juga menunjukkan bahwa intoleransi sering kali terjadi dalam bentuk konflik antaragama, yang berpotensi mengancam persatuan bangsa [3].

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana toleransi dapat diukur secara sistematis di tingkat kota. Dengan memanfaatkan data statistik yang tersedia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi toleransi di Indonesia, beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi

panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program-program yang mendukung kerukunan antarumat beragama, sekaligus memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa [4], [5].

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis distribusi toleransi antar umat beragama di setiap provinsi di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 yang diterbitkan oleh Setara Institute yang mencakup berbagai indikator untuk menilai tingkat toleransi, seperti aspek pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan interaksi antarumat beragama. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses situs resmi Setara Institute yang menyediakan informasi tentang skor toleransi untuk masing-masing kota di Indonesia. Objek kajian dalam laporan IKT mencakup 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Empat kota yang tidak dimasukkan dalam penilaian adalah kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi satu kota besar, yaitu DKI Jakarta. Penggabungan ini dilakukan karena kota-kota administrasi tersebut tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan secara terpisah sehingga tidak memungkinkan untuk dinilai secara independen [6].

Setelah data dikumpulkan, proses pengolahan data dilakukan menggunakan Python. Langkah-langkah pengolahan data mencakup pembersihan data untuk menghapus entri yang tidak relevan atau duplikat, serta transformasi data untuk memastikan format data sesuai untuk analisis lebih lanjut. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi distribusi data menggunakan uji normalitas seperti Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal. Selain itu, visualisasi data dilakukan melalui plotting wilayah, histogram, dan Q-Q plot untuk memahami pola distribusi skor toleransi di berbagai provinsi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan distribusi skor toleransi secara spasial dan statistik, serta memberikan wawasan mengenai pola kinerja provinsi terkait toleransi di Indonesia.

III. DATA DAN ANALISIS

A. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memiliki kegunaan utama dalam memberikan gambaran awal tentang data sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. Pada bagian ini, dianalisis komponen

Tabel I. Statistik Deskriptif Kota

Komponen	Mean	Median	Std	Min	Max
IND1	4.23	4.085	0.91	2	6.5
IND2	6.60	6.825	0.55	4.55	7
IND3	6.47	7	0.85	3.5	7
IND4	3.79	4	1.11	1	6

IND5	4.18	4	1.02	2	6
IND6	4.26	4	1.14	2	7
IND7	3.74	4	1.08	2	6
IND8	3.96	4	1.11	2	6
Skor Akhir	5.06	5.015	0.54	4.01	6.5

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap delapan indikator yang menggambarkan isu toleransi di berbagai kota, terlihat bahwa indikator-indikator terkait regulasi pemerintah kota, seperti kebijakan diskriminatif (Indikator 2), memiliki nilai rata-rata tertinggi (6.60). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah menghindari penerapan kebijakan yang diskriminatif. Namun, indikator terkait dinamika masyarakat sipil (Indikator 4) memiliki nilai rata-rata yang jauh lebih rendah (3.79), mencerminkan kelemahan dalam keterlibatan masyarakat sipil terkait isu toleransi. Indikator terkait peristiwa intoleransi (Indikator 3) juga menunjukkan hasil yang relatif positif dengan rata-rata 6.47, tetapi masih terdapat variasi signifikan antar daerah, dengan nilai minimum sebesar 3.5.

Sementara itu, tindakan nyata pemerintah terkait isu toleransi (Indikator 6) menunjukkan kontribusi yang cukup moderat dengan rata-rata 4.26, tetapi rentang nilai yang luas dari 2.0 hingga 7.0 mencerminkan perbedaan signifikan dalam tingkat perhatian pemerintah di berbagai daerah. Demografi sosio-keagamaan, seperti heterogenitas keagamaan (Indikator 7) dan inklusi sosial keagamaan (Indikator 8), memiliki rata-rata 3.74 dan 3.96, menunjukkan tingkat keberagaman dan inklusivitas yang masih perlu ditingkatkan di banyak daerah.

Skor akhir dari data ini menunjukkan rata-rata 5.06 dengan standar deviasi yang rendah (0.54), mencerminkan konsistensi skor antar daerah. Indikator-indikator seperti kebijakan diskriminatif dan peristiwa intoleransi tampaknya memberikan kontribusi paling signifikan terhadap skor akhir. Namun, rendahnya nilai pada indikator seperti dinamika masyarakat sipil dan inklusi sosial keagamaan menunjukkan adanya tantangan dalam mendorong toleransi di tingkat masyarakat. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran di setiap wilayah.

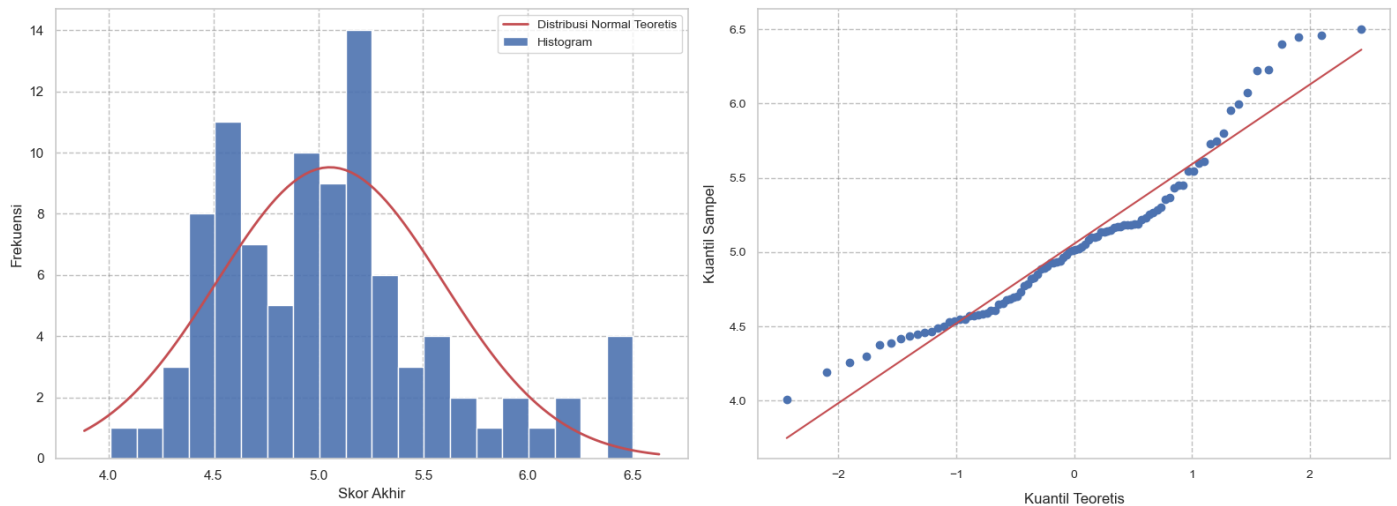
B. Analisis Distribusi

Analisis distribusi memberikan penjelasan mengenai seberapa merata tingkat toleransi di Indonesia. Digunakan dua metode yang dapat diukur menggunakan *p-value* seperti tabel berikut.

Tabel II. Uji Distribusi

Metode	Sampel	Nilai Statistik	<i>p-value</i>
Kolmogorov-Smirnov	94	0.115023	0.153676
Shapiro-Wilk	94	0.942809	0.000454

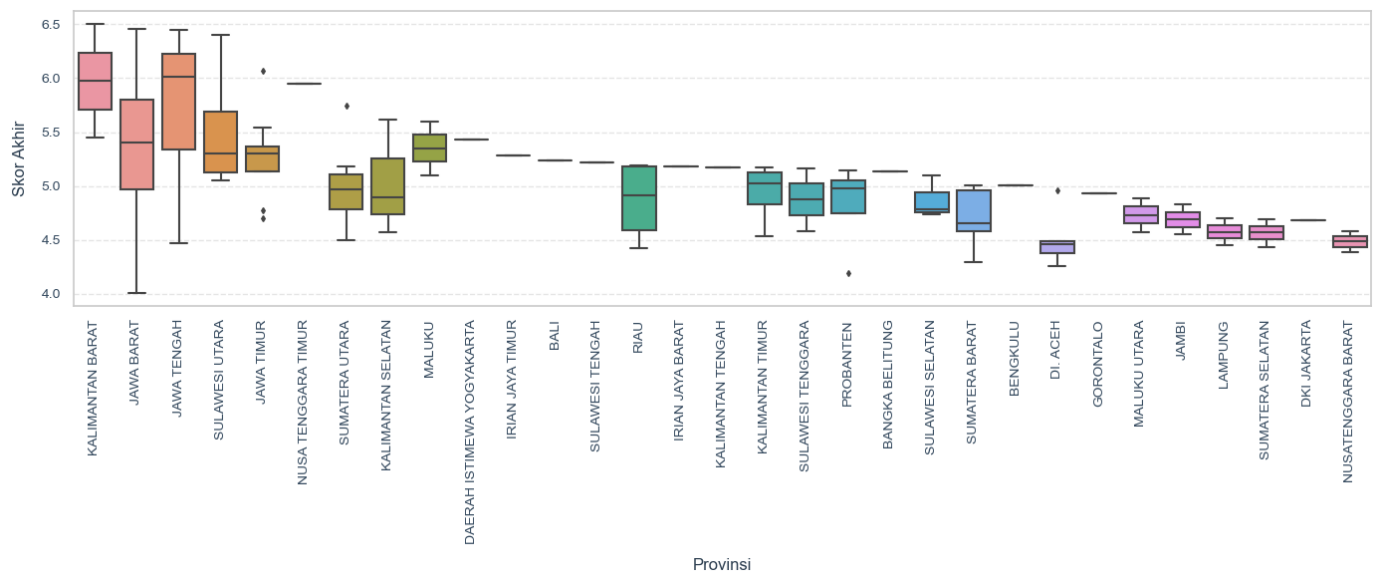
Berdasarkan hasil uji distribusi, terdapat perbedaan hasil antara dua metode yang digunakan. Uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan p -value sebesar 0.15367 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 sehingga hipotesis nol bahwa data berdistribusi normal tidak ditolak. Sebaliknya, uji Shapiro-Wilk memberikan p -value sebesar 0.000454 yang jauh lebih kecil dari 0.05 sehingga hipotesis nol ditolak, menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, meskipun salah satu metode tidak menunjukkan penyimpangan distribusi, hasil uji Shapiro-Wilk dan visualisasi mendukung bahwa distribusi skor akhir tidak sepenuhnya mengikuti pola distribusi normal.



Gambar 1. Histogram distribusi skor akhir dengan kurva distribusi normal teoretis (kiri) dan Q-Q Plot (kanan) yang menunjukkan penyimpangan pada kuantil ekstrem dari garis distribusi normal

Distribusi skor akhir yang divisualisasikan melalui histogram dan kurva normal memperlihatkan bahwa sebagian besar skor terpusat di sekitar rata-rata, tetapi terdapat penyimpangan terutama pada ekor distribusi. Kurva normal (berwarna merah) mencocokkan distribusi sebagian besar data di tengah, tetapi penyimpangan terlihat pada skor yang lebih tinggi dan lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data tidak sepenuhnya sesuai dengan distribusi normal.

Q-Q Plot mendukung temuan ini dengan memperlihatkan deviasi data aktual dari garis referensi distribusi normal. Pada bagian tengah, data mendekati garis normal, tetapi pada bagian ekor (baik kuantil rendah maupun tinggi), terdapat penyimpangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal, terutama pada skor yang lebih ekstrem.



Gambar 2. Boxplot skor akhir setiap provinsi

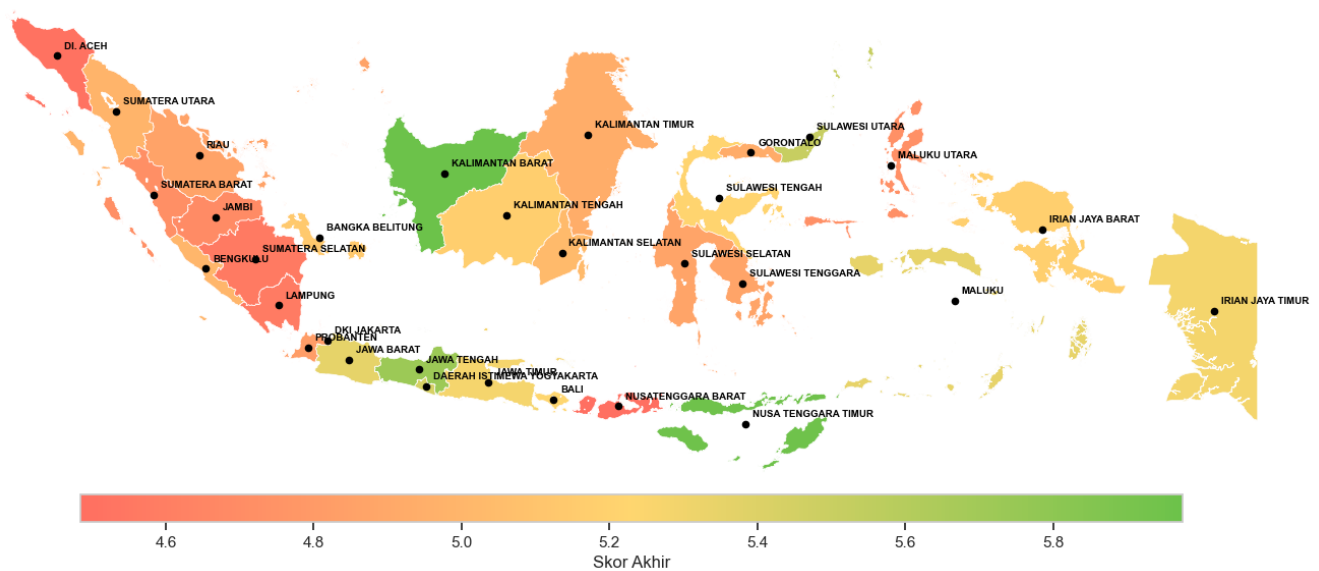
Rentang skor yang lebar pada provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagaimana terlihat pada boxplot, menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam performa kota atau kabupaten di kedua provinsi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan besar antara kota-kota dengan skor tinggi dan rendah dalam indikator yang dievaluasi.

Pada Jawa Barat, rentang yang lebar mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kota atau kabupaten yang memiliki skor akhir tinggi, ada juga beberapa wilayah yang kinerjanya jauh lebih rendah. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan tingkat implementasi kebijakan pemerintah, dinamika masyarakat sipil, atau heterogenitas demografi sosial-keagamaan antar wilayah di provinsi ini.

Rentang yang lebar menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan kebijakan, dinamika sosial, atau faktor lainnya di dalam provinsi. Hal ini menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih terarah dan spesifik untuk mengatasi tantangan di wilayah dengan skor rendah, sekaligus memperkuat praktik baik di wilayah dengan skor tinggi. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor spesifik yang menyebabkan variasi ini, seperti evaluasi terhadap indikator-indikator tertentu yang menunjukkan disparitas paling besar.

C. Analisis Spasial

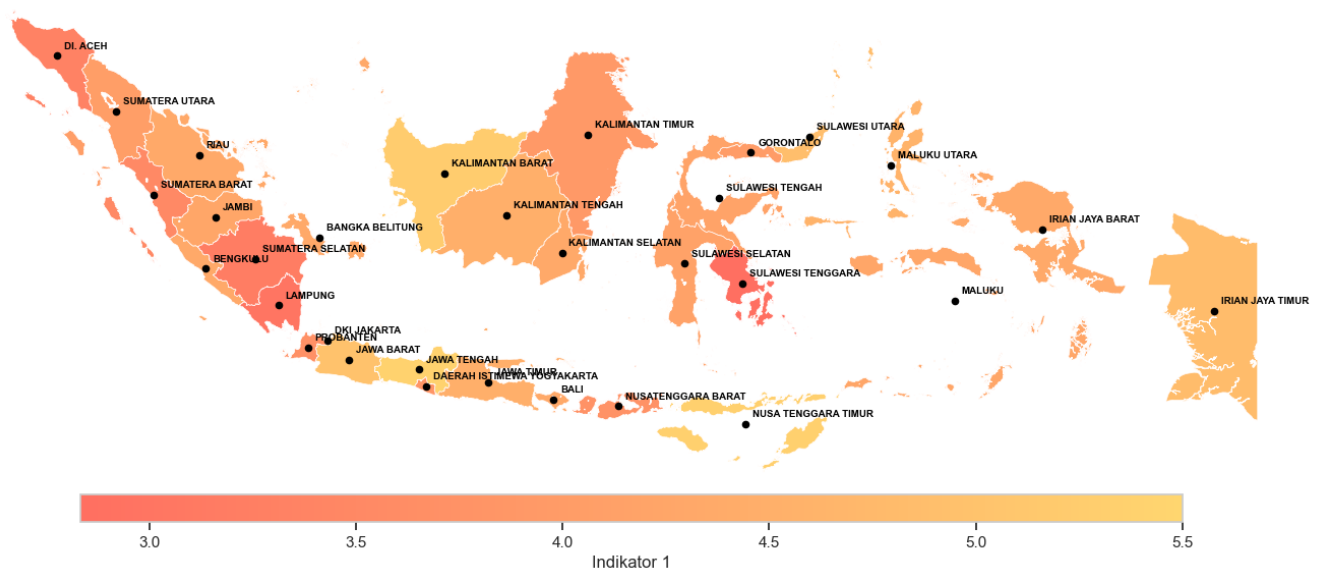
Analisis spasial tiap provinsi bermanfaat untuk mengidentifikasi pola geografis dalam distribusi skor, membantu mendeteksi wilayah prioritas dengan skor rendah, dan merancang kebijakan berbasis wilayah yang lebih terarah. Selain itu, visualisasi ini mempermudah komunikasi data kepada pemangku kepentingan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi serta memantau efektivitas kebijakan toleransi dari waktu ke waktu sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan strategis.



Gambar 3. Visualisasi spasial skor akhir setiap provinsi

Peta distribusi skor toleransi akhir menunjukkan bahwa Pulau Sumatera secara keseluruhan tergolong sebagai wilayah dengan tingkat toleransi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dominasi warna merah dan oranye yang melambangkan skor toleransi rendah pada peta, mencakup hampir seluruh provinsi di Sumatera. Provinsi seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi secara khusus menampilkan skor yang rendah, mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam mencapai tingkat toleransi yang lebih baik. Bahkan, provinsi seperti Aceh dan Sumatera Utara yang memiliki skor lebih baik dibandingkan provinsi lain di Sumatera tetap berada pada tingkat toleransi yang moderat sebagaimana ditunjukkan oleh warna oranye pada peta.

Dalam konteks distribusi nasional, wilayah Sumatera cenderung tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua yang menunjukkan skor toleransi yang lebih tinggi dan didominasi warna kuning hingga hijau pada peta. Pulau Jawa, meskipun memiliki variasi skor, tetap menunjukkan performa yang lebih baik di beberapa provinsi dibandingkan dengan Sumatera. Di sisi lain, wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua cenderung berada pada kategori skor toleransi yang lebih tinggi, mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih inklusif.



Gambar 4. Visualisasi spasial indikator 1 setiap provinsi

Peta distribusi skor untuk Indikator 1—rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya—menunjukkan bahwa banyak provinsi di Indonesia memiliki skor yang tergolong rendah. Warna merah hingga oranye pada peta menyoroti provinsi-provinsi dengan performa yang lemah dalam indikator ini. Provinsi seperti Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara secara jelas berada dalam kategori skor rendah, mencerminkan bahwa rencana pembangunan dan produk hukum di wilayah tersebut masih belum cukup mendukung pemajuan toleransi secara efektif.

Rendahnya skor pada indikator ini menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai toleransi. Pemerintah pusat dan provinsi perlu bekerja sama untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan memastikan bahwa RPJMD di seluruh daerah mencerminkan komitmen terhadap keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Upaya ini dapat dilakukan melalui peninjauan ulang produk hukum yang diskriminatif dan penyusunan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk mendukung toleransi di tingkat lokal. Hal ini menjadi langkah penting untuk memperbaiki performa daerah-daerah dengan skor rendah dan meningkatkan kerangka regulasi di seluruh Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil memetakan distribusi toleransi di Indonesia berdasarkan analisis skor akhir dari 94 kota yang dinilai melalui kerangka indeks dengan empat variabel utama dan delapan indikator spesifik. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi signifikan dalam tingkat toleransi antar wilayah. Rata-rata skor akhir sebesar 5.06 dengan standar deviasi yang rendah mencerminkan konsistensi skor di sebagian besar wilayah, meskipun terdapat tantangan yang diungkapkan melalui indikator seperti dinamika masyarakat sipil dan inklusi sosial keagamaan.

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk memberikan hasil yang berbeda. Kolmogorov-Smirnov tidak menolak hipotesis normalitas, sedangkan Shapiro-Wilk menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Visualisasi distribusi, seperti histogram dan Q-Q plot, memperkuat hasil Shapiro-Wilk dengan menunjukkan penyimpangan pada kuantil ekstrem, terutama pada bagian ekor distribusi.

Pemetaan spasial menunjukkan bahwa wilayah Sumatera memiliki tingkat toleransi yang cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya, seperti Kalimantan dan Papua, yang menunjukkan skor toleransi lebih tinggi. Rentang skor yang lebar di beberapa provinsi, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, mengindikasikan adanya ketimpangan internal antar wilayah di provinsi tersebut. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih terarah untuk mengatasi tantangan di wilayah dengan skor rendah sekaligus memperkuat praktik baik di wilayah dengan skor tinggi.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami distribusi toleransi di Indonesia. Dengan memanfaatkan temuan ini, pembuat kebijakan dapat merumuskan program-program yang lebih efektif dan berbasis data untuk mempromosikan toleransi dan harmoni sosial di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini juga memberikan dasar yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut terkait faktor-faktor spesifik yang memengaruhi skor toleransi di berbagai wilayah.

REFERENSI

- [1] K. P. dan K. R. Indonesia, *Laporan Penelitian Toleransi Beragama di Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022. [Online]. Tersedia: <https://www.kemdikbud.go.id>
- [2] B. P. Statistik, “Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS),” 2022. [Online]. Tersedia: <https://www.bps.go.id>
- [3] A. Rahman and S. H. Nasution, “Dinamika Sosial dan Toleransi Beragama di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 2, pp. 123–135, 2021.
- [4] D. Ramdani, E. MPd, and B. Rachman, “Toleransi sebagai bentuk implementasi Pancasila sila ke-1.”
- [5] S. Fitriani, “Analisis: Jurnal Studi Keislaman Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama,” *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 20, no. 2, pp. 179–192, 2020, doi: 10.24042/ajsk.
- [6] I. Yosarie, S. Insiyah, N. Aiqani, H. Hasan, and I. Hasani, *Indeks Kota Toleran TAHUN 2023 PENULIS Indeks Kota Toleran*. [Online]. Tersedia: www.setara-institute.org

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa makalah yang saya tulis ini adalah tulisan saya sendiri, bukan saduran, atau terjemahan dari makalah orang lain, dan bukan plagiasi.

Bandung, 25 Desember 2024


Muhammad Fathur Rizky (13523105)